

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu dimensi dasar dalam memperluas pilihan dan meningkatkan kapabilitas manusia (Badan Pusat Statistik, 2019). Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan dan kompetensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup serta kesiapan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pemerintah kemudian berupaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan dua belas tahun pendidikan dasar serta menengah, dengan tujuan memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap pendidikan yang bermutu dan mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan (Kementrian Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2025). Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap angka partisipasi sekolah meningkat dan angka putus sekolah dapat ditekan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin.

Meskipun demikian, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum sepenuhnya merata. Kelompok masyarakat miskin ekstrem dan rentan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan ekonomi, akses geografis, hingga kondisi sosial keluarga (Kementrian Pendidikan

Dasar Dan Menengah, 2025). Sejumlah kajian menegaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan memiliki hubungan erat dengan kemiskinan struktural serta rendahnya mobilitas sosial, sehingga memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus (UNESCO, 2022). Berbagai kebijakan pendidikan telah diterapkan, fenomena putus sekolah masih menjadi permasalahan nasional di Indonesia. Anak-anak dari keluarga miskin masih menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya dukungan sosial, serta hambatan akses pendidikan yang menyebabkan mereka tidak mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan wajib belajar belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah
2023	76.834 anak
2024	78.468 anak
2025	56.000 anak

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Fenomena putus sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan pendidikan. Pada periode 2023 hingga 2024, jumlah anak putus sekolah mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa persoalan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan. Namun, pada tahun 2025 jumlah tersebut kembali mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan putus sekolah bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga penurunan pada tahun 2025 tidak serta-merta menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah telah terselesaikan. (Yulianto Umar Rofi'i, 2024) menjelaskan

bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di pedesaan Indonesia memiliki resiko putus sekolah lebih tinggi, karena mereka dianggap sebagai tenaga kerja tambahan dalam rumah tangga. Masalah ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 1.2 Jumlah Anak Putus Sekolah di Jawa Timur Tahun 2023-2025

Tahun	Jenjang SD/MI	Jenjang SMP/MTS	Jenjang SMA/MA	Total
2023	1.792	2.468	842	5.102
2024	2.654	2.141	931	5.726
2025	3.327	2.878	734	6.939

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Di Provinsi Jawa Timur, fenomena putus sekolah masih terjadi pada seluruh jenjang pendidikan dan menunjukkan kecenderungan meningkat seiring naiknya tingkat pendidikan. Tabel 1.2 menunjukkan jumlah peserta didik putus sekolah pada Tahun Ajaran 2022/2023 tercatat sebanyak 5.726 anak yang terdiri atas 2.654 anak pada jenjang SD/MI, 2.141 anak pada jenjang SMP/MTs, dan 931 anak pada jenjang SMA/MA. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada Tahun Ajaran 2023/2024 menjadi 6.942 anak, dengan jumlah masing-masing 3.327 anak pada jenjang SD/MI, 2.878 anak pada jenjang SMP/MTs, dan 737 anak pada jenjang SMA/MA. Namun, pada Tahun Ajaran 2024/2025 jumlah peserta didik putus sekolah mengalami penurunan menjadi 4.952 anak, yang terdiri atas 2.438 anak pada jenjang SD/MI, 1.780 anak pada jenjang SMP/MTs, dan 734 anak pada jenjang SMA/MA. Meskipun terjadi penurunan pada tahun ajaran terakhir, data tersebut menunjukkan bahwa putus sekolah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam memastikan

keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi hambatan dalam mengakses dan mempertahankan pendidikan.

Tabel 1.3 Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Tuban Tahun 2023-2025

Tahun	Presentase
2023	2.953
2024	2.647
2025	5.950

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2025

Kabupaten Tuban sebagai salah satu daerah di Jawa Timur juga menghadapi tantangan serupa dalam bidang pendidikan. Tabel 1.3 menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak putus sekolah dalam 3 tahun terakhir. Angka putus sekolah di Kabupaten Tuban masih di pengaruhi oleh akses pendidikan yang terbatas. Desa-desa di wilayah kecamatan seperti Merakurak, Kerek, dan Parengan masih mengalami keterbatasan transportasi dan fasilitas pendidikan. Penelitian (Setyadi, 2022) menemukan bahwa ketimpangan akses pendidikan disebabkan oleh infrastruktur dan jarak sekolah yang jauh di pedesaan, sehingga memperbesar resiko putus sekolah. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi berpengaruh pada akses pendidikan masyarakat.

Kemiskinan dan pendidikan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat memperbesar peluang seseorang berada dalam kondisi miskin, sementara kemiskinan juga dapat membatasi akses individu terhadap pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi sekolah memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan sehingga pendidikan sering dipandang instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Asri & Hanifa, 2025). Dalam praktiknya, keluarga

miskin sering menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan pendidikan anak. Tidak sedikit anak yang membantu pekerjaan orangtua di sektor pertanian, perdagangan, maupun pekerjaan informal lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan seringkali dipandang sebagai kebutuhan jangka panjang yang harus bersaing dengan tuntutan ekonomi keluarga sehari-hari.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan layanan pendidikan semata belum cukup untuk menjamin keberhasilan pembangunan pendidikan. Keberhasilan pendidikan juga memerlukan keterlibatan masyarakat, khususnya keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, dukungan keluarga berpengaruh terhadap keputusan anak untuk melanjutkan pendidikan, bertahan dalam proses pendidikan, serta mencapai keberhasilan belajar. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dapat dijelaskan melalui konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Keith Davis dan John W. Newstrom (1985) dalam (Hamid, 2018). Davis dan Newstrom menjelaskan bahwa partisipasi pada dasarnya merupakan keterlibatan individu, baik secara mental maupun emosional, dalam suatu kelompok yang kemudian mendorongnya untuk memberikan sumbangsih demi tercapainya tujuan bersama serta memiliki kesediaan untuk memikul tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, partisipasi tidak dapat dipahami hanya sebatas kehadiran seseorang secara fisik dalam suatu kegiatan, tetapi juga tercermin melalui adanya dukungan, kontribusi nyata, dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dalam bidang pendidikan, keterlibatan masyarakat memiliki peranan

yang cukup penting, sebab keberhasilan suatu program pendidikan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah dan pihak sekolah, melainkan turut dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat ikut terlibat dalam proses pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat dapat terlihat dari kesediaan orangtua mendukung pendidikan anak, memberikan motivasi, membangun komunikasi dengan sekolah, serta mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak meskipun menghadapi berbagai kesulitan.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Sesuai dengan yang INPRES Nomor 8 Tahun 2025 salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Pengembangan Program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan sosial, program sekolah rakyat ini merupakan sekolah gratis berbasis asrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata sekaligus menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan layanan pendidikan formal, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik selama tinggal di asrama. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan seluruh kebutuhan peserta didik, seperti tempat tinggal, konsumsi, alat belajar, seragam, dan

perlengkapan sekolah yang ditanggung oleh pemerintah sehingga peserta didik dari keluarga miskin dapat mengikuti pendidikan tanpa dibebani biaya tersebut (Aulia, 2025). Dengan konsep tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Grahadi, 2025). Meskipun demikian, keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas yang diberikan pemerintah. Konsep pendidikan berasrama juga membawa konsekuensi adanya perubahan pola kehidupan peserta didik karena mereka harus mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan dalam lingkungan asrama, sehingga kesiapan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tata kehidupan baru menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah keputusan mengizinkan anak untuk tinggal di asrama bukanlah keputusan yang mudah, karena mereka dianggap sebagai tenaga kerja tambahan dalam rumah tangga (Yulianto Umar Rofi'i, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program sekolah rakyat sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Dukungan keluarga menjadi faktor penting yang menentukan apakah anak bersedia mengikuti pendidikan berasrama dan mampu bertahan dalam program tersebut.

Tabel 1.4 Daftar Sekolah Rakyat Terintegrasi

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
2	Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3	Sekolah Rakyat Terintegrasi 3	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

	Pasuruan	
4	Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang	Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
5	Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo	Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
6	Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember	Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
7	Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo	Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
8	Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang	Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
9	Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
10	Sekolah Rakyat Terintegrasi 10 Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
11	Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir	Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
12	Sekolah Rakyat Terintegrasi 12 Kepulauan Anambas	Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
13	Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
14	Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur	Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
15	Sekolah Rakyat Terintegrasi 15 Empat Lawang	Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
16	Sekolah Rakyat Terintegrasi 16 Bandung	Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
17	Sekolah Rakyat Terintegrasi 17 Cimahi	Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
18	Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Tuban	Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
19	Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo	Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
20	Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
21	Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju	Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
22	Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
23	Sekolah Rakyat Terintegrasi 23 Katingan	Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
24	Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Permensos Nomor 7 Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.4, Kabupaten Tuban ditetapkan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin terutama desil 1 dan desil 2. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari kelompok masyarakat kurang mampu di kabupaten Tuban.



Gambar 1.1 Pelaksanaan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Tuban

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 2026

Namun demikian, pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban, terdapat beberapa calon peserta didik yang menolak mengikuti program Sekolah Rakyat karena tidak bersedia tinggal di asrama. Penolakan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pendidikan, melainkan juga karena anak memiliki peran dalam membantu aktivitas ekonomi keluarga seperti bekerja di sawah, ladang, atau membantu pekerjaan orangtua sehari-hari. Bagi sebagian keluarga miskin, keberadaan anak tidak hanya berfungsi sebagai anggota keluarga, tetapi juga

sebagai bagian dari strategi rumah tangga dalam mempertahankan kondisi ekonomi keluarga. Dalam situasi ini, sekolah bukan satu-satunya prioritas, karena kebutuhan ekonomi sehari-hari menjadi hal yang lebih mendesak. Selain itu, terdapat faktor kebiasaan atau budaya kerja dalam keluarga yang membuat anak terbiasa ikut bekerja sejak usia sekolah.

"Dua siswa Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Tuban memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasan utamanya cukup sederhana namun manusiawi — keduanya mengaku belum betah tinggal jauh dari keluarga. Kepala SR Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairun Nisa, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bonang." (Andreyan, 2025).

Ditengah adanya penolakan terhadap Program Sekolah Rakyat, sebagian besar peserta didik yang telah diterima justru mampu bertahan mengikuti pendidikan berbasis asrama. Berdasarkan data awal di Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban, dari 50 peserta didik yang diterima terdapat dua peserta didik yang mengundurkan diri setelah program berjalan. Salah satu peserta didik telah digantikan oleh calon peserta didik lain, sedangkan satu kuota peserta didik hingga saat ini belum terisi kembali. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, pengunduran diri tersebut disebabkan oleh kesulitan peserta didik dalam beradaptasi dengan kehidupan asrama dan belum siap tinggal jauh dari keluarga. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana sejumlah peserta didik memilih mengundurkan diri karena belum mampu menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan berasrama serta kesulitan berpisah dengan orang tua.

Kondisi menunjukkan adanya perbedaan respons masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat. Di satu sisi terdapat keluarga yang memilih menolak atau menarik kembali keikutsertaan anaknya, sedangkan di sisi lain terdapat keluarga yang tetap mendukung anak untuk bertahan mengikuti pendidikan berasrama meskipun harus kehilangan kontribusi tenaga anak dalam aktivitas ekonomi rumah tangga. Fakta ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Sekolah Rakyat, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, dukungan keluarga selama pelaksanaan program, pemanfaatan manfaat yang diberikan program, serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap keberlangsungan program tersebut.

Selain itu, Program Sekolah Rakyat ditujukan secara khusus bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang termasuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik yang saat ini masih bertahan mengikuti program. Apakah peserta didik yang mengikuti Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari keluarga sasaran sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, serta bagaimana keluarga tersebut mengelola kondisi ekonomi rumah tangga setelah anak tidak lagi membantu pekerjaan keluarga. Pertanyaan ini menjadi penting karena keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas pendidikan yang diberikan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesediaan dan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Penelitian mengenai Sekolah Rakyat mulai banyak dilakukan sejak program ini ditetapkan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh (Rafid et al., 2025) dalam artikel berjudul *Public Schools and Critical Education: Alternative Education Policy in Indonesia*. Penelitian tersebut menganalisis Sekolah Rakyat sebagai kebijakan pendidikan alternatif dalam perspektif pendidikan kritis Paulo Freire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat miskin, memperkuat partisipasi lokal, serta mendukung transformasi sosial melalui pendidikan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis kebijakan dan konsep pendidikan kritis, sehingga belum mengkaji secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran program terbentuk dan berlangsung dalam praktik pelaksanaan Sekolah Rakyat. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan Sekolah Rakyat.

Penelitian ini berangkat dari adanya Program Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Meskipun program tersebut memberikan pendidikan secara gratis melalui sistem asrama, dalam pelaksanaannya ditemukan fenomena adanya peserta didik yang menolak mengikuti program maupun mengundurkan diri karena tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan berasrama. Di sisi lain, sebagian besar peserta didik tetap bertahan mengikuti program hingga saat ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji, khususnya mengenai bagaimana berpartisipasi masyarakat terutama orangtua dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat. Fenomena adanya peserta didik yang mengundurkan diri pada Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban karena tidak mampu beradaptasi dengan sistem asrama, sementara sebagian besar peserta didik lainnya tetap bertahan, menunjukkan adanya perbedaan bentuk dukungan, keterlibatan, dan komitmen dari masyarakat maupun keluarga peserta didik. Atas dasar tersebut, kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keterlibatan masyarakat di dalam program tersebut. Penelitian ini berlandaskan pada teori partisipasi yang dikemukakan oleh Keith Davis dan John W. Newstrom (1985), dengan melihat partisipasi melalui aspek keterlibatan mental dan emosional, kontribusi yang diberikan, serta tanggung jawab dalam mendukung tercapainya tujuan program. Dengan menggunakan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, khususnya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Dari uraian latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN TUBAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian latar belakang serta data yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai bagaimana bentuk dan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi perkembangan keilmuan Administrasi Publik, terutama dalam memahami peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah. Di samping itu, hasil penelitian diharapkan mampu menambah khazanah literatur akademik terkait penggunaan teori partisipasi Keith Davis dan John W. Newstrom (1985), yang mencakup aspek keterlibatan mental dan emosional, kontribusi, serta tanggung jawab masyarakat dalam menunjang pencapaian tujuan program publik. Temuan yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang membahas keterlibatan masyarakat, baik dalam penyelenggaraan

pendidikan maupun dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi literatur dan sumber referensi di perpustakaan, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan topik serupa, terutama dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik.

2. Bagi Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban terkait bentuk serta tingkat keterlibatan masyarakat, terutama orang tua peserta didik, dalam menunjang proses pendidikan anak. Temuan penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan merancang langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pihak sekolah, peserta didik, dan orang tua dapat terjalin secara lebih baik sehingga pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan sekaligus menambah pengalaman dalam mengaplikasikan konsep dan teori Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan. Proses penelitian juga diharapkan dapat melatih kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara sistematis, mengkaji berbagai fenomena sosial, serta memahami secara lebih mendalam peran masyarakat dalam menunjang pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.